



Anggaran Jamkesda Yogya Naik Hanya Rp 100 Juta

YOGYA, TRIBUN - Anggaran Jaminan Kesehatan Daerah Kota Yogyakarta pada 2015 ditetapkan sebesar Rp 27,9 miliar. "Hanya ada kenaikan sekitar Rp100 juta dibanding tahun lalu. Hal ini disesuaikan dengan realisasi jaminan kesehatan daerah pada tahun lalu," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (PJKD) Kota Yogyakarta, Umi Nur Chariyati, di Yogyakarta, Jumat (9/1).

Hingga akhir 2014, UPT PJKD telah membayarkan klaim dari rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya sebesar Rp27,386 miliar. Klaim yang sudah dibayarkan tersebut belum memperhitungkan klaim pada Desember 2014.

UPT PJKD Kota Yogyakarta menargetkan seluruh rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya menyampaikan klaim Desember 2014 paling lambat pada pertengahan Januari agar bisa segera dibayarkan.

Umi mengatakan, penyebab anggaran jaminan kesehatan daerah yang tidak terlalu berbeda dibanding tahun lalu tersebut salah satunya karena pada 2016 program jaminan itu akan terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Pembayaran klaim jaminan kesehatan daerah sudah mulai berkurang karena sudah banyak warga Kota Yogyakarta yang menjadi peserta BPJS Kesehatan," katanya.

Ia menyebut, anggaran ideal jaminan kesehatan daerah seharusnya mengalami peningkatan tiap tahun karena adanya peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah. "Idealnya ada peningkatan 10 persen. Namun, tahun ini tidak ada peningkatan anggaran yang signifikan karena sudah ada 63,78 persen warga Kota Yogyakarta yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan," katanya.

Oleh karena itu, diperkirakan hanya ada sekitar 40 persen warga Kota Yogyakarta yang akan mengakses jaminan kesehatan daerah tersebut pada 2015. "Harapannya, anggaran yang disiapkan cukup hingga akhir tahun. Apalagi, ada peningkatan kepesertaan secara mandiri sekitar satu persen setiap bulan," kata Umi melanjutkan.

Selain kepesertaan secara mandiri yang bisa diakses oleh warga mampu, terdapat peserta Penerima Bantuan Iur (PBI) yang berasal dari warga kurang mampu. Kota Yogyakarta memperoleh kuota 105.632 peserta PBI sesuai pendataan secara nasional yang dilakukan pada 2011.

Namun demikian, masih ada perbedaan data PBI apabila disandingkan dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Data PBI didasarkan pada domisili, sedangkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan atas kartu tanda penduduk (KTP).

"Ada perbedaan sekitar 40.000 jiwa sehingga perlu ada pemutakhiran data," katanya. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Jamkesda			

Yogyakarta, 02 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005